



## **QUO VADIS LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH PASCA KEMERDEKAAN DAN PASCA REFORMASI**

**Maskuri<sup>1</sup>, Muhammad Riza<sup>2</sup>, Subardi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: masykuri@unisma.ac.id<sup>1</sup>, rizajundana@gmail.com<sup>2</sup>, subardi@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** The Dayah Islamic education institution is a tradition of Islamic teaching and learning that has existed along with the entry and development of Islam into the archipelago in the 8th century AD. The development of Dayah institution since its emergence has experienced ups and downs along with social changes that have occurred in Acehnese society. The research intends to describe and provide an interpretation of the changes in Dayah Islamic education institution in the post-independence of Indonesia, which is a momentum for its reborn after colonialism and its development in the post of reformation era, especially since the enactment of Aceh Government Law No.11 in 2006. This research was conducted purposively at Dayah in Aceh. To explore the related data, this study conducted interviews with a number of informants consisting of Abu, Teungku and Aceh Dayah Education Service Practitioners. In order to support other related data, this study also uses observation and conducts documentary studies on dayah. The results of this study indicate that the development of Dayah in the post-independence of Indonesia is strongly influenced by the Dayah Darussalam Labuhan Haji South Aceh network which developed by Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Meanwhile, the development of Dayah in the post of reformation era has started to shift its management from a community-based to a government-based pattern with the involvement of the Aceh government through the Dayah Education Office in the form of supervision, quality control and strengthening of managerial capacity as a manifestation of the implementation of Aceh Government Law No. 11 of 2006.

**Keywords:** Dayah Islamic Education, Post-Independence, Post Reformation Era

**Abstrak:** Lembaga pendidikan Islam Dayah merupakan tradisi belajar mengajar Islam yang telah ada sejak masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi. Perkembangan institusi Dayah sejak kemunculannya mengalami pasang surut dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan interpretasi atas perubahan institusi pendidikan Islam Dayah pasca kemerdekaan Indonesia yang menjadi momentum kebangkitannya pasca penjajahan dan perkembangannya pasca reformasi, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan secara sengaja di Dayah di Aceh. Untuk menggali data terkait, penelitian ini melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang terdiri dari Praktisi Dinas Pendidikan, Abu, Teungku dan pengurus Dayah di Aceh. Untuk mendukung data terkait, penelitian ini juga menggunakan observasi dan studi dokumenter tentang Dayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Dayah pasca kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh jaringan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dikembangkan oleh Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Sementara itu, perkembangan Dayah pasca reformasi mulai bergeser pengelolaannya dari pola berbasis masyarakat menjadi berbasis pemerintahan dengan melibatkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah berupa pengawasan, pengawasan mutu dan penguatan kapasitas manajerial sebagai wujud implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam Dayah, Pasca Kemerdekaan, Era Pasca Reformasi

### **PENDAHULUAN**

Keberadaan Dayah di Aceh dipercayai sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Pernyataan ini tentunya tidak muncul tanpa diiringi dengan argumentasi yang

dapat diterima. Salah satu alasan yang menguatkan pernyataan ini adalah teori tentang masuknya Islam ke wilayah kepulauan Nusantara yang diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke- 8 Masehi (Hasjmi, 1993). Kondisi geografis Aceh yang menghadap ke dua muka laut yakni samudera Hindia dan selat Malaka menjadikannya sebagai wilayah yang sangat strategis untuk dilalui oleh para pengembara armada laut memanfaatkan lintas wilayah saat itu. Hal ini pula kemudian melahirkan beberapa teori terkait dengan pembawa Islam pertama sekali ke Nusantara yang setidaknya terdiri dari empat teori utama yakni teori Arab, teori Gujarat, teori Persia dan teori Cina dan lainnya (Hasbi Amiruddin, 2004). Dari sekian teori yang ada ini teori Arab dan Gujarat dianggap lebih dapat diterima oleh beberapa kalangan sejahrawan yang *concern* tentang hal ini. Salah satunya adalah Hasjmi (1993) yang mengatakan bahwa Islam yang masuk Aceh pertama sekali dibawa oleh sebuah armada yang dikenal sebagai armada khalifah. Armada ini sebagaimana yang ia sebutkan terdiri dari 100 orang yang terdiri orang Arab Quraisy, Persia dan Gujarat yang berangkat menuju Aceh melalui sebuah wilayah yang disebut Peurlak pada tahun 840 Masehi.

Dalam perkembangannya Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dengan terjadinya proses akulturasi. Masyarakat Aceh yang saat itu masih merupakan masyarakat Hindu, Budha dan sebagian lainnya masih menganut animisme dengan mudah berbaur dengan para pendatang yang datang dalam rangka menyebarkan Islam dan melakukan perdagangan. Islam sebagai sebuah ajaran berkembang begitu cepat dalam masyarakat Aceh saat itu yang ditandai dengan konversi agama yang dilakukan oleh para Raja dan tokoh penting lainnya sehingga mendorong terjadi pertumbuhan penganut Islam secara *massive* (Azmi, 2020). Salah satu media yang digunakan oleh para pendatang ini dalam mengembangkan Islam adalah menjadikan pojok-pojok masjid yang ada sebagai sarana pembelajaran Islam bagi para masyarakat yang sedang mendalami Islam (Amiruddin, 2010). Penggunaan pojok-pojok masjid untuk kepentingan pembelajaran ajaran Islam dalam hal ini merupakan tradisi yang telah berkembang pada masa awal Islam di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat lainnya. Dalam bahasa Arab pojok atau sudut masjid ini disebut dengan istilah “*zawiyah*”. Lambat laun penggunaan pojok masjid (*zawiyah*) ini berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian dengan penyesuaian lidah (aksen) berubah menjadi “*dayah*” (Abubakar, 2015). Perkembangan dayah sebagai media dakwah bergerak secara dinamis menjadi lembaga pendidikan Islam yang diinisiasi oleh salah

satu pangeran kerajaan Peurlak yang bernama Teungku Muhammad Amin yang melahirkan sebuah institusi pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan Zawiyah Cot Kala atau Dayah Cot Kala pada abad ke – 10 Masehi (Hadi, 2014).

Keberadaan Dayah Cot Kala ini menjadi fondasi bagi berkembangnya lembaga pendidikan Islam ini dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Aceh. Posisi lembaga pendidikan Islam dayah menjadi sangat vital hal ini dimungkinkan dikarenakan ia menjadi sarana penyediaan sumber daya manusia yang handal saat itu sehingga tidak mengherankan bila kemudian banyak para alumninya saat itu menjadi raja, qadhi, panglima militer dan lainnya (Mashuri, 2013). Dalam perjalanan selanjutnya perubahan kekuasaan yang terjadi di Aceh dalam bentuk kerajaan Islam yang terus berkembang secara beriringan ikut merubah dan mengembangkan dayah sehingga mencapai kegemilangannya pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa ini dayah sebagai lembaga pendidikan Islam telah diatur secara berjenjang yang merujuk kepada aturan besar yang dibuat oleh kerajaan yang dikenal dengan sebutan *Qanun Meukuta Alam*. Dalam penjenjangan pendidikan Islam terdiri dari pendidikan dasar yang diselenggarakan di *Meumasah*, pendidikan menengah yang diselenggarakan di *Rangkang*, pendidikan menengah atas di dayah dan pendidikan tinggi di dayah *manyang*. Salah satu dayah manyang yang terkenal saat itu adalah dayah *manyang* Baiturrahman yang difasilitasi dengan berbagai cabang keilmuan. Dayah manyang ini pula yang berandil dalam menghadirkan para syekh dari Arab, Gujarat dan Persia untuk menjadi pengajar dalam lembaga pendidikan tersebut seperti Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Gujarat, India (Amiruddin, 2013).

Selanjutnya dayah dalam perkembangan selanjutnya pada masa kolonial Belanda mengalami proses kemunduran hal ini diakibatkan kondisi perang yang berkepanjangan. Orientasi pendidikan dayah yang sebelumnya telah berkembang pesat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan berubah menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme (Silahuddin, 2016). Para ulama dayah memberikan respon terhadap kolonialisme dengan menggalakan perang suci terhadap penjajah melalui karya-karya syair mereka. Semangat perang tanpa kenal takut mati ini kemudian sempat membuat para penjajah Belanda kabut sehingga mereka menyebutkan masyarakat Aceh dengan istilah *Aceh Morden* atau Aceh gila. Pasca kemerdekaan Indonesia kondisi dayah dalam hal ini dapat dikatakan mati suri hingga kemudian terlahir kembali ditandai dengan lahirnya beberapa dayah seperti Dayah Teungku Hasan Krueng Kale dan Dayah

Darussalam Labuhan Haji yang didirikan oleh Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy pada tahun 1936. Dayah terakhir ini kemudian membangun jaringan ulama dayah yang sampai saat ini eksis melalui para alumni langsung dan tidak langsung Abuya yang kemudian mendirikan dayah di daerahnya masing-masing.

Eksistensi dayah dalam lintas sejarah Aceh sejak masuknya Islam ke Nusantara setidaknya mengalami pasang surut sejak kelahirannya sampai dengan masa ia terlahir kembali pasca kemerdekaan Indonesia. Penulis dalam hal berargumen bahwa keberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam memainkan peran yang cukup penting dalam perubahan socio-relegio masyarakat Aceh sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji eksistensi lembaga pendidikan Islam dayah pasca kelahirannya kembali (*reborn*) pasca kemerdekaan Indonesia dan perbuahan yang terjadi dalam perkembangannya pasca reformasi yang terkait langsung dengan dinamika sosial masyarakat Aceh khususnya setelah lahirnya Undang-undang pemerintah Aceh No.11 tahun 2006.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Genealogi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam**

Terminologi dayah secara bahasa berasal dari kata *zawiyah* dalam bahasa Arab yang berarti pojok. Dalam konteks ini dayah merujuk kepada pengajian-pengajian yang diselenggarakan pada pojok-pojok mesjid di Madinah pada masa awal Islam (Marzuki, 2011). Pembelajaran di pojok-pojok ini pada saat itu diperuntukkan bagi beberapa orang kelompok yang datang ke Madinah di Mesjid Nabawi untuk mempelajari agama Islam. Tradisi pembelajaran Islam ini disebutkan ikut dibawa dan dikembangkan oleh para penyebar Islam ketika berada di Aceh (Amiruddin, 2010). Dalam perjalanannya kata *zawiyah* dalam bahasa Arab mengalami penyesuaian dalam penuturan bahasa lokal masyarakat Aceh hingga kemudian menjadi dayah (Hamdan, 2017).

Dalam sejarahnya dayah Cot Kala merupakan institusi pendidikan Islam pertama yang terdapat di Asia Tenggara (Hasjmi, 1993). Fungsi dayah pada masa tersebut secara umum adalah media yang digunakan dalam melakukan islamisasi dalam tradisi yang telah terbangun dalam masyarakat dan pada saat bersamaan memberikan pengetahuan tentang ritual ibadah dalam Islam untuk diamalkan (Mizaj, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka kurikulum pendidikan dayah saat itu didominasi oleh pembelajaran tentang Tauhid, Hukum Islam dan Tasawuf (Dicky, 2017). Pendidikan dayah selanjutnya mulai

sedikit berubah ketika peran dayah bersinggungan dengan kerajaan Islam Peurlak. Kebijakan yang diterapkan oleh kerajaan membuat dayah melakukan proses adaptasi kurikulum dengan tidak hanya mengajarkan materi tentang ajaran Islam juga mengikutsertakan di dalamnya materi tentang ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu bumi, sejarah, manajemen administrasi hingga bahasa Arab dan kecakapan-kecakapan lainnya bagi para peserta didik (Hasjmi, 1993). Perkembangan dayah Cot Kala saat itu sangat dipengaruhi oleh para petinggi kerajaan yang umumnya adalah para ulama yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan masyarakat saat itu hal ini pula yang mendorong kemajuan dayah tersebut pada akhir-akhir abad ke-3 H atau awal abad ke-10 M.

## **2. Lembaga Pendidikan Dayah dalam Dimensi *Socio-Religio* Masyarakat Aceh**

Meskipun lembaga pendidikan dayah dalam perjalanannya saat ini dapat dikatakan berada pada fase kemunduran namun fungsi dan peran masyarakat dayah dalam masyarakat tetap eksis sebagaimana yang telah berkembang dalam tradisi sosial keagamaan di Aceh (Ilyas, 2012). Penguasaan terhadap keilmuan dalam ajaran Islam telah menempatkan para ulama dayah dan masyarakatnya memiliki legitimasi tersendiri dalam masyarakat (Mastuhu, 2005). Menurut Hasbi (2013) dalam hal ini setidaknya terdapat empat fungsi dayah yang bersifat *inherent* dalam perjalanan sejarah masyarakat Aceh sampai saat ini, yakni:

### **a. Dayah sebagai Media Penyebaran Islam**

Sejak pertama sekali Islam menginjakkan kakinya di Nusantara melalui Peurlak dayah telah menjadi media dalam penyebaran Islam. Hal ini dilakukan oleh para pendakwah yang datang dari Arab, Persia dan lainnya melalui jalur perdagangan. Dalam mengembangkan ajaran Islam para pendakwah ini menggunakan pojok-pojok masjid untuk mengajarkan masyarakat tentang ajaran Islam. Lambat laun tradisi yang dilakukan ini mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam formal dalam naungan kerajaan.

### **b. Dayah sebagai Pusat Pendidikan Islam**

Perjalanan lembaga pendidikan dayah yang memperoleh momentumnya melalui legitimasi kerajaan-kerajaan Islam mampu mengantarkannya pada fase kemajuan. Fase kemajuan ini menempatkan dayah tidak hanya menjadi media pengembangan dakwah Islam di Aceh bahkan menjadi lembaga pendidikan yang bersifat intergratif yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam pengembangan keilmuan lainnya

(Mashuri, 2013). Puncak dari hal ini kemudian menjadikan Aceh sebagai daerah dengan masyarakatnya yang cukup kosmopolit ditandai dengan terjadinya proses akulturasi dengan para pengajar yang didatangkan dari luar yang kelak menjadi penasihat sultan atau ulama terkemuka yang dikenal cukup produktif dalam melahirkan karya-karyanya dalam pendidikan agama Islam.

c. Dayah sebagai Pusat Perlawanan terhadap kolonialisme

Kekuasaan kerajaan Aceh yang lambat laun mengalami kemunduran semakin melemahkan nilai tawarnya dalam politik internasional saat itu. Serangan-serangan dari pihak luar khususnya Portugis membuka jalan bagi terjadinya kerjasama dengan pihak luar salah satunya adalah dengan menjadikan Belanda sebagai mitra dagang. Akses yang dimiliki Belanda ini yang kemudian dalam perjalanannya menjadi *boomerang* bagi melemahnya nilai tawar kerajaan disamping pada sisi lainnya menjadikan nilai tawar Belanda menjadi lebih kuat. Puncak dari menguatnya nilai tawar Belanda terhadap kerajaan Aceh adalah dengan lahirnya maklumat perang yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menguasai Aceh pada tahun 1873 (Hasjmi, 1993).

Meskipun pada masa awal agresi yang dilakukan oleh Belanda sempat mendapatkan perlawanan yang sengit dari pihak kerajaan ditandai dengan tewasnya salah satu jenderal Belanda Van Kohler, namun seiring dengan berjalannya waktu otoritas kerajaan dapat dikuasai. Perlawanan terhadap kolonial Belanda selanjutnya berpindah ke kalangan petinggi kerajaan dan hulubalang (Djaelani, 1994). Di samping perlawanan yang digenjarkan oleh para petinggi kerajaan dan hulubalang, para ulama dayah juga turut andil upaya melawan penjajah. Dengan terjadinya peperangan pada masa kolonial ini praktis lembaga pendidikan dayah relatif sulit dalam melakukan proses pembelajaran sebagaimana biasanya hal ini diakibatkan oleh serangan Belanda ke dayah-dayah sehingga bangunan lembaga pendidikan tersebut ikut luluh lantak (Amiruddin, 2010). Para ulama dayah dalam masa berhasil menanamkan semangat perang jihad dengan melakukan propaganda-proganda melalui ajaran-ajarannya kepada para santri. Salah satu yang paling dikenal adalah hikayat *prang sabi* yang menjadikan para santri menjadi makin militan tidak takut mati dalam peperangan (Dhuhri, 2014). Diantara perang antara para santri dayah dengan penjajah Belanda yang cukup dikenal adalah kegigihan para santri Samalanga yang berhasil membangun benteng pertahanan yang kokoh di daerah

Bate Iliék yang dalam peperangan ini juga berhasil membuat mata seorang jenderal Belanda Van Heijden menjadi buta sebelah (Djaelani, 1994).

d. Dayah sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat

Ulama dayah sebagai sosok kharismatik dalam struktur sosial masyarakat Aceh menjadikannya sebagai agen perubahan disamping perannya sebagai penyebar agama Islam (Armia, 2014). Dalam lintas sejarah Aceh peran ulama dayah tidak dapat dikesampingkan sejak masa awal Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara sampai dengan saat ini. Pada masa awal ulama melalui pendidikan Islam dayah yang dikembangkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang handal pada masanya. Selanjutnya dalam konteks kerajaan yang pernah berkembang di Aceh dari sejak kerajaan Peurlak, Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam, ulama dayah selalu mendapatkan tempat khusus dalam pengembangan masyarakat melalui perannya sebagai mufti kerajaan yang dikenal dengan istilah *Qadhi Malikul Adil* (Ahmad, 2017). Selanjutnya pada masa kolonial Belanda, Jepang para ulama dayah kembali menunjukkan peran serta sebagai *agen of change* dalam masyarakat dengan memberikan respon melalui semangat perang *fi sabillillah* yang mampu menggelorakan daya juang masyarakat Aceh dalam perjuangan mengusir penjajah. Dalam dinamika politik selanjutnya yang berkembang di Indonesia secara umum dan secara khusus di Aceh, para ulama dayah telah ikut berandil dalam menengahi setiap konflik yang terjadi misalnya yang paling teranyar adalah peran mereka dalam proses perdamaian konflik berkepanjangan antara GAM dengan pemerintah pusat (Bambang, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan interpretasi terhadap perubahan lembaga pendidikan Islam Dayah pasca kemerdekaan Indonesia dan perubahannya dalam perkembangan pasca reformasi khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut maka desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian fenomenologis dimana data-data yang disajikan merupakan data-data empirik yang diperoleh pada latar alamiah (Bogdan dan Taylor, 1975). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*Indepth-Interview*) dengan sejumlah informan yang dipilih secara *purposive* yang terdiri dari sejumlah tokoh dayah seperti Abu, Teungku dan praktisi pendidikan dayah yang berasal dari pemerintah yang dalam hal ini dinas

pendidikan dayah Aceh. Di samping itu, guna menjangkau informasi-informasi yang lainnya, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian diproses dengan menggunakan skema analisis data yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan (Miles and Huberman, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kelahiran Kembali Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Kemerdekaan**

Kemunculan lembaga pendidikan Dayah pasca kolonialisme dalam perjalanannya dapat dikatakan berada pada fase yang dapat dikatakan sebagai masa kemunduran (Duhri, 2014). Dasar yang menjadi argumentasi ini adalah dayah yang sebelumnya sempat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui ulama-ulamanya yang melahirkan karya-karya dalam pengajaran Islam. Perkembangan lembaga pendidikan dayah ini terjadi pada saat kerajaan-kerajaan Islam berada pada masa kejayaannya seperti kerajaan Samudera Pasai yang diwakili pada masa Sultan Al-Mansur atau kerajaan Aceh Darussalam yang diwakili pada masa Sultan Iskandar Muda.

Seiring dengan dinamika politik yang berkembang selanjutnya pada masa kolonialisme seiring itupula lembaga pendidikan dayah mengalami pasang surut karena keberadaannya dihadapkan sebagai pusat perlawanan terhadap kolonialisme. Sebagaimana yang diketahui orientasi pendidikan dayah yang pada mulanya adalah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan bergeser pada upaya untuk mempertahankan diri dari hegemoni penjajah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, lembaga pendidikan dayah yang dalam hal ini dapat dikatakan mati suri berusaha untuk lahir kembali (*reborn*) dengan semangat pengajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kehadiran lembaga pendidikan dayah pada saat itu mencoba untuk menyusun kembali sistem pendidikan Islam yang pernah ada (Hasil Wawancara).

Pengaruh kolonialisme dalam perkembangan dayah setelahnya masih sangat dirasakan dimana pendidikan dayah hanya berfokus pada pengajaran ritual ibadah dalam Islam saja. Hal ini dapat sangat dimaklumi mengingat keberadaan lembaga pendidikan dayah pada masa kolonial mendapat pengawasan yang sangat ketat karena dianggap sebagai pusat pergerakan terhadap pemerintahan Belanda. Selain pengajaran ritual ibadah dalam bentuk ilmu fiqh, pembelajaran yang berkembang di dayah juga diikuti dengan



pengajaran ilmu tasawuf. Kurikulum pendidikan dayah yang seperti ini tentunya sangat menguntungkan pemerintahan kolonial (Hasil Wawancara).

Momentun kelahiran dayah kembali dalam kehidupan masyarakat Aceh ditandai dengan lahirnya dayah-dayah dalam kurun waktu tahun 1930-an. Salah satu dayah yang dalam hal ini dapat dikatakan cukup berpengaruh adalah lembaga pendidikan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan disamping dayah-dayah yang lain seperti dayah Darussa'adah dan dayah Tanoh Abei (Hasil Wawancara). Dayah ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Abu Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy pada tahun 1936 (Saiful, 2018). Argumentasi bahwa dayah ini dianggap berpengaruh pasca kemerdekaan sampai dengan saat ini adalah sanad keilmuan atau jaringan ulama dayah yang ada saat ini hampir mayoritasnya adalah murid-murid langsung atau tidak langsung dari Abu Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Konsep pendidikan dayah yang dikembangkan oleh beliau yang berlandaskan pada pengajaran ilmu Fiqh, Tauhid dan Tasawuf menjadi pakem yang digunakan oleh jaringan murid-muridnya dalam mengembangkan lembaga pendidikan dayah selanjutnya sampai saat ini (Hasil Wawancara).

Kehadiran jaringan model dayah Darussalam Labuhan Haji yang dianggap cukup konservatif bukan tidak mendapatkan rivalitas. Adalah Muhammad Daud Beureueh yang saat itu dianggap sebagai tokoh politik dan ulama telah mencoba membawa modernisasi dalam pendidikan Islam di Aceh yang dimotorinya dengan membangun sebuah organisasi yang disebut sebagai PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Gagasan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Daud Beureueh diwujudkan dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan model Madrasah. Dalam perjalanannya tokoh ini kemudian terlibat dengan gerakan DI/TII yang mengakibatkan model pendidikan Islam madrasah yang ia kembangkan terbengkalai. Momentum ini kemudian secara tidak langsung membuat pendidikan dayah dengan sistem pendidikan konservatifnya menjadi berkembang karena tokoh-tokohnya tidak terlibat dalam dinamika politik yang ada (Hasil Wawancara).

Perjalanan lembaga pendidikan dayah selanjutnya praktis didominasi oleh jaringan ulama dayah Darussalam Labuhan Haji. Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy telah mampu melakukan proses kaderisasi ulama-ulama setelahnya melalui model pendidikan dayah yang ia kembangkan. Dari sekian murid yang memiliki sanad keilmuan langsung ke Abuya Muda Wali beberapa diantaranya menjadi pemegang estafet dalam pengembangan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh saat ini. Diantara

mereka ini terdapat Teungku Abdullah Hanafi yang merupakan murid generasi pertama Abuya Muda Wali atau yang dikenal dengan sebutan Abu Tanoh Mirah yang mendirikan Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah yang sempat menjadi rujukan pendidikan dayah pada era tahun 1980-an sampai dengan 1990-an.

Selanjutnya murid generasi kedua Abuya yang juga mendirikan dan mengembangkan dayah adalah Abon Abdul Aziz Samalanga. Beliau adalah kerabat dari pendiri dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga yang sebelumnya telah pernah eksis, namun perlawanan terhadap kolonial Belanda dalam perjalanannya sejak diresmikan oleh Sultan Iskandar pada abad ke -16 telah menjadikan dayah ini mati suri. Dalam perjalanan selanjutnya ketika estafet kepemimpinan dayah berada di bawah tangan Abon Abdul Aziz sekembalinya dari masa pendidikan di dayah Darussalam Labuhan Haji telah mampu mendorong kembali eksistensi dayah ini dalam kancah kehidupan masyarakat Aceh (Hasil Wawancara).

Sejak Abon Aziz wafat pada tahun 1980-an peralihan kepemimpinan jatuh kepada salah satu murid senior dan juga menantu beliau yakni Teungku Hasanul Bashri yang akrab dikenal saat ini sebagai Abu Mudi. Kiprah beliau dalam memimpin dayah Mudi telah menjadikannya sebagai salah satu kiblat pendidikan Islam terkemuka di Aceh saat ini. Hal ini ditandai dengan jumlah santri yang terus menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan dayah-dayah lainnya. Di samping itu lahir dan berkembangnya sejumlah dayah yang didirikan oleh para alumni dayah Mudi di hampir semua wilayah Aceh khususnya Aceh bagian Timur-Utara dengan ciri khusus yakni penisbatan al-Aziziyah pada setiap nama dayah-dayah tersebut yang merujuk kepada tokoh karismatik dayah Mudi yakni Abon Abdul Aziz.

Ada pun murid Abuya Muda Wali generasi ketiga yang cukup dikenal saat ini di Aceh adalah Teungku Muhammad Amin atau yang akrab disebut dengan Abu Tumin Blang Blahdeh. Beliau sendiri saat ini menjadi salah satu ulama yang cukup kharismatik di Aceh, hal ini dimungkinkan karena beliau menjadi salah satu murid Abuya Muda Wali yang masih hidup saat ini. Di samping itu beliau juga masih aktif dalam memimpin lembaga pendidikan dayahnya yakni dayah Madinatuddiniyah Babussalam Blang Blahdeh Bireuen di usianya yang terbilang cukup senja. Selanjutnya murid Abuya Muda Wali yang mendapatkan langsung sanad keilmuan dari beliau adalah anak-anak beliau yang terdiri dari Abu Prof. Muhibbuddin Wali (generasi pertama), Abu Jamaluddin Wali, Abu Nasir Wali, Abu Mawardi Wali dan Abu Amran Wali. Semua zuriyah Abuya Muda

Wali ini secara bergiliran menjadi pimpinan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan (Hasil Wawancara).

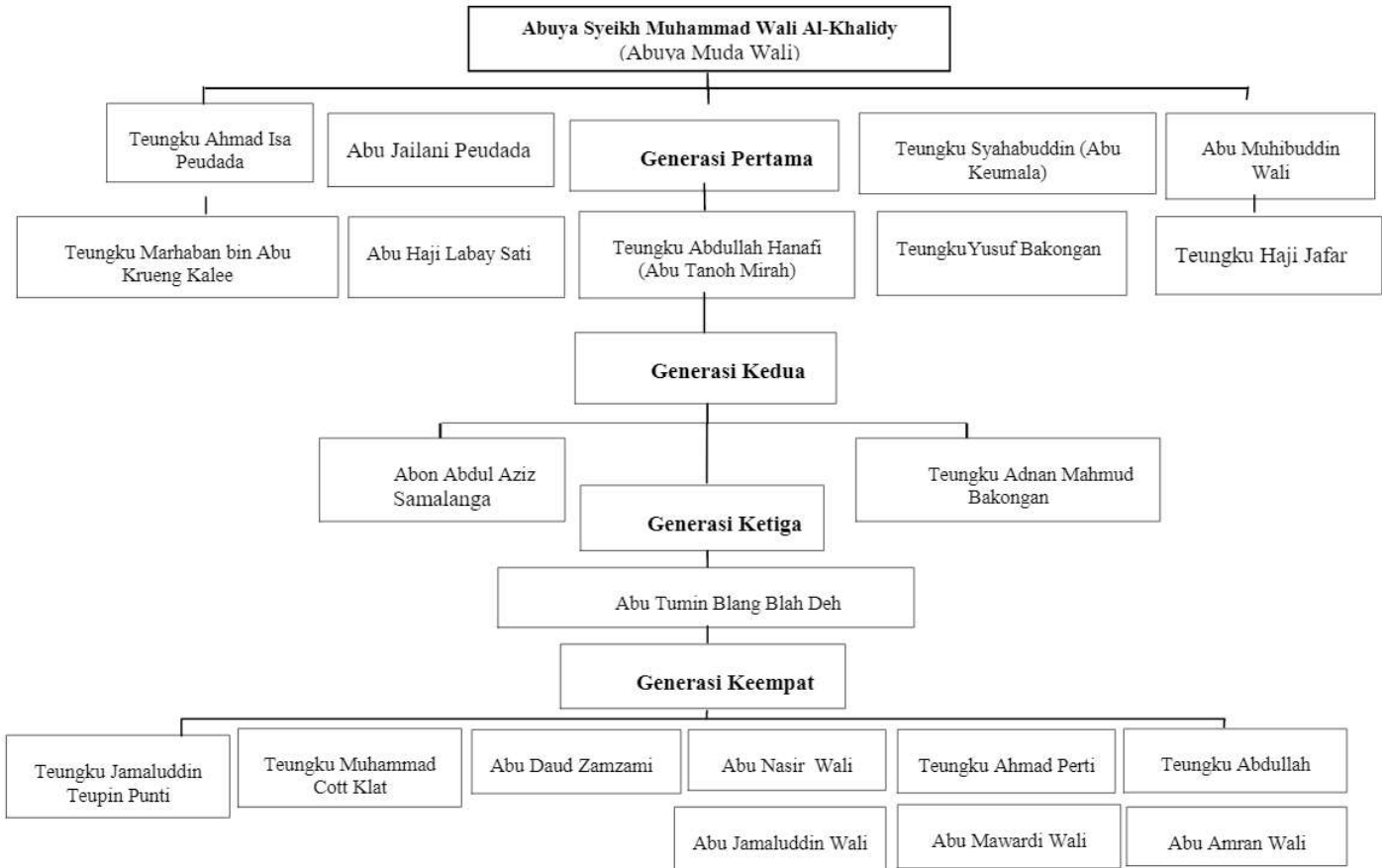


Figure 1. Jaringan Dayah Darussalam Labuhan Haji Melalui Syekh Muhammad Wali Al-Khalidy

Lembaga pendidikan dayah yang eksis saat ini di Aceh secara umum bila merujuk pada sanad keilmuan yang terbangun sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam hal ini dapat dikatakan berasal dari jaringan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Maka berdasarkan hal tersebut maka struktur dan pola penjenjangan pendidikan dalam dayah saat ini merupakan *prototype* dari dayah yang dikembangkan oleh Abuya Muda Wali pada tahun 1936. Dayah yang ada saat ini secara penjenjangan terdiri dari kelas satu sampai dengan kelas sembilan. Para santri senior yang berada di kelas sembilan biasanya merupakan kader yang dipersiapkan untuk menjadi pengajar dalam dayah tersebut atau pada akhirnya diberikan ijazah untuk mendirikan dayah sendiri sekembalinya ke daerahnya masing-masing.

## 2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Reformasi

Perkembangan lembaga pendidikan dayah di Aceh bergerak cukup dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi dalam dinamika masyarakatnya. Salah satu yang cukup berpengaruh dalam hal ini adalah dinamika politik masyarakat Aceh yang naik turun ibarat rel *coaster* pasca kemerdekaan Indonesia. Warna keislaman yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh menjadikannya sebagai *bargain* politik yang terus bergulir sampai dengan saat ini. Konsekuensi dari realitas ini adalah Aceh sebagai sebuah wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kekhususan dalam menjalan syariat Islam. Khusus ini dalam tarik menarik kepentingan dengan pemerintah pusat dalam kekhususan ini membuat wilayah Aceh pernah menjadi DI (Daerah Istimewa), kemudian pada era Presiden Gus Dur menjadi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) sampai kemudian dikeluarkannya Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 2006 setelah terjadinya perdamaian antara kelompok GAM dengan pemerintah pusat berubah kembali menjadi provinsi Aceh sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini (Hasil Wawancara).

Perubahan dinamika politik di Aceh khususnya pasca reformasi telah berpengaruh terhadap perkembangan eksistensi lembaga pendidikan dayah di Aceh. Hal ini tentunya berisikan langsung dengan *issue* penerapan syariat Islam yang tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari upaya revitalisasi dayah sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran Islam sebagai tradisi keilmuan yang telah terbangun dalam masyarakat Aceh. Untuk menjembatani hal tersebut misalnya pemerintah pusat mengeluarkan beberapa undang-undang terkiat misalnya undang-undang No.44 tentang keistimewaan Aceh, selanjutnya undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan yang paling teranyar adalah undang-undang No.11 tentang pemerintahan Aceh. Secara lokal pemerintah provinsi melalui gubernur dalam menterjemahkan undang-undang ini mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan lembaga pendidikan dayah.

Lahirnya beberapa aturan pelaksanaan pendidikan Islam dayah Aceh dalam perjalanannya telah sedikit membuka ruang bagi terjadinya pergeseran dayah yang selama ini dalam pertumbuhannya bertumpu pada (*community based*) kearah (*government based*). Salah satu contoh dari fenomena ini misalnya dapat dilihat dari upaya pemerintah Aceh pasca reformasi untuk membuat standarisasi lembaga pendidikan dayah. Pada kesempatan ini dilakukan klasifikasi lembaga pendidikan dayah berdasarkan tipe A, B, C dan bahkan non tipe. Standar ini digunakan pemerintah secara sederhana

untuk melihat jumlah santri, jumlah dewan guru (*teungku*) dan infrastruktur pendukung lainnya yang dimiliki sebuah dayah. Tujuan akhir yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pasca reformasi sampai lahirnya UU PA adalah masih sebatas pada upaya memberikan dukungan sumber dana yang dapat digunakan dalam menjalankan proses pendidikan di dayah.

Pengaruh peranan pemerintah dalam pengelolaan dayah mengalami peningkatannya ditandai dengan lahirnya UU PA. Selanjutnya pemerintahan Aceh pasca damai yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf memberikan *concern* terhadap lembaga pendidikan dayah berdasarkan Qanun No.5 tahun 2007 dengan melahirkan sebuah badan khusus yang disebut dengan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Lembaga ini diberikan wewenang oleh pemerintah Aceh untuk melakukan beberapa hal yakni; (1) pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran, (2) Pelaksanaan Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif, (3) Pelaksanaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Pengajar, (4) Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri, (5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah (Hasil Wawancara). Dalam perjalanannya legitimasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah ini kemudian mendapatkan penguatan peranya dengan dijadikannya lembaga tersebut sebagai Dinas Pendidikan Dayah yang tertuang dalam Pergub Aceh No. 132 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan Dayah Aceh.

Keberadaan dinas dayah sebagai amanat dari UU PA bertujuan untuk melakukan reformasi Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang pernah mengalami masa kejayaannya pada masa kesultanan Aceh dimana saat itu lembaga dayah diatur dengan sedemikian rupa melalui aturan kerajaan yang dikenal dengan *Qanun Meukuta Alam* (Hasil Wawancara). Oleh karena itu kehadiran dinas dayah ini sangat berkaitan dengan reformasi pengelolaan dayah yang meliputi beberapa unsur di dalamnya. Diantara unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni unsur *Human Element* yang terdiri dari Abu atau sebutan lainnya seperti Abon, Abi, Abah dan Walid sebagai figur pimpinan dayah, kemudian *teungku* sebagai tenaga pendidik dayah dan santri atau yang disebut dengan *aneuk meudagang* dalam tradisi dayah. Selanjutnya, unsur penting lainnya dari dayah adalah unsur non *Human element* yang terdiri kurikulum dayah, masjid, rangkang/balei dan asrama/bilek (Bakri, 2009).

Pada unsur *Human Element* peran Abu sebagaimana pimpinan dayah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan dayah. Seorang pimpinan dayah yang

dianggap kharismatik pada kesempatan tertentu menjadikan dayah tarik dalam masyarakat sehingga berdampak pada jumlah santri dan pada sisi lainnya mendukung sumber pendanaan operasional dayah. Dayah sebagaimana pesantren di Jawa umumnya dimiliki secara personal oleh seorang Kyai atau Abu dalam konteks Aceh (Dhofier, 1994). Karena faktor kepemilikan ini kemudian maka secara konsekuensi kepemimpinan dayah bersifat satu arah atau menggunakan tipologi kepemimpinan tunggal (Sukamto, 1999). Hal ini pada sisi tertentu mengakibatkan dayah sebagai sebuah unit organisasi kadangkala mengalami permasalahan dalam membangun tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Dayah dalam konteks ini relatif tidak terorganisir dengan baik sehingga salah satunya berimbas pada pengembangan keilmuan santri, kesejahteraan dewan guru dan *output* lulusan.

Berdasarkan fakta yang ada tersebut, maka dinas dayah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya berupaya melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas unsur human element dengan beberapa program yang berkaitan dengan pendampingan dalam manajemen dayah, pengembangan kurikulum dayah, dukungan dana operasional dayah dalam bentuk penggajian dewan guru, pelatihan-pelatihan ekonomi produktif. Penguatan unsur non Human Element dalam sarana prasarana dilakukan dengan cara pemetaan dan klasifikasi dayah berdasarkan tipe-tipe dayah yang telah diatur oleh dinas dayah. Target jangka menengah dari program dinas dayah yang dalam hal ini telah berumur lebih dari satu dekade adalah lahirnya Badan Akreditasi Dayah (BADA) sebagai upaya pengawasan dan pengendalian mutu dayah dimasa mendatang (Hasil Wawancara).

Dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan Islam dayah saat ini maka dapat dikatakan dayah sebagai institusi yang secara tradisi bersifat cukup konservatif baik secara manajerial maupun secara kurikulumnya perlahan-perlahan telah berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Penyesuaian ini dalam konteks Aceh terjadi karena terjadinya pergeseran pengelolaan dayah yang sebelumnya bersifat *community based* ke arah *government based* yang bersifat kolaboratif dengan munculnya peran pemerintah dalam pengelolaannya. Fenomena lainnya yang cukup relevan dengan upaya penyesuaian lembaga pendidikan dayah dengan perkembangan dunia kekinian adalah lahirnya lembaga-lembaga pendidikan formal dalam lingkungan pendidikan dayah sebagaimana yang dipelopori oleh dayah Mudi Mesra Samalanga melalui pemikiran Abu Hasanoel Bashry (Abu Mudi) dengan mendirikan Institut Agama Islam Al-Aziziyah, Ma'had Aly dalam naungan dayah tersebut.

## KESIMPULAN

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh telah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam perubahan sosial di Aceh. Dinamika politik yang melingkupi perjalanan sejarah Aceh juga ikut mewarnai penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dayah dalam menjalankan peran sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran ajaran Islam, pusat penyebaran Islam pada masa awal Islam masuk ke Nusantara, pusat perlawanan terhadap kolonialisme dan sebagai pusat pengembangan masyarakat. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi, lembaga pendidikan Islam dayah mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam sempat mengalami mati suri seiring masuknya kolonialisme ke wilayah Nusantara yang diakibatkan oleh perang yang terus terjadi. Kemerdekaan Indonesia menjadi *turning point* bagi lahirnya kembali dayah dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Salah satu jaringan dayah yang berpengaruh dalam eksistensi dayah yang ada saat ini adalah jaringan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan melalui Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Selanjutnya, dalam perkembangan saat ini, dayah telah sedikit mengalami perubahan seiring lahirnya Undang-undang No. 11 tentang pemerintah Aceh yang didalamnya mengamankan revitalisasi lembaga dayah sebagai bagian dari implementasi kekhususan Aceh dalam menjalankan syari'at Islam. Implementasi dari Undang-undang tersebut adalah lahirnya Dinas Dayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengembangan, pengawasan dan pengelolaan dayah ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. (2015). *Pesantren di Aceh : Perubahan, Aktualisasi dan Pengembangan*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Ahmad, K. B. (2017). *Acelmologi* (Volume 2). Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Armia, N. (2014). Teungku Dayah dan Kekuasaan Panoptik. *Substantia*, 16(1), 13–33. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4914>
- Azmi, K. (2020). *Aceh Vs Barus di Panggung Sejarah Islam* (Cet. Pertama). Malang: Ahli Media Press.
- Bakri, M. (2009). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran*. Surabaya: Visipress Media.
- Bambang, W. (2013). *Resolusi Konflik Untuk Aceh : Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: CV. Makmur Cahaya Ilmu.

- Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren*, cet. VI, Jakarta: LP3ES.
- Dhuhri, S. (2014). *Dayah : Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Endatu Aceh*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
- Dicky, W. (2017). Pemikiran Tasawuf Syaikh Muhammad Waly Al-Khalidy. *Aricis*, 1(2016), 351-367.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/958>
- Djaelani, A. Q. (1994). *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Cetak Pert). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hadi, A. (2014). Dinamika Sistem Institusi Pendidikan Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeum*, 2(3), 179-194.  
[https://www.researchgate.net/publication/282607231\\_Dinamika\\_Sistem\\_Institusi\\_Pendidikan\\_di\\_Aceh](https://www.researchgate.net/publication/282607231_Dinamika_Sistem_Institusi_Pendidikan_di_Aceh)
- Hamdan. (2017). Dayah Dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Jurnal Al-HIKMAH*, 8(1), 108-121.  
<https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.402>
- Hasbi Amiruddin, M. (2004). *Eksistensi Dayah Masa Depan di Provinsi NAD*. Lhokseumawe: Buletin MPU Kabupaten Aceh Utara.
- Hasbi Amiruddin, M. (2010). *Apresiasi Dayah sebagai lembaga Pendidikan Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Hasbi Amiruddin, M. (2013). *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Hasjmi, A. (1993). *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Benua Bintang.
- Ilyas, M. (2012). *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Marzuki, M. (2011). Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh. *Millah*, 11(1), 222-233.  
<https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art11>
- Mashuri, M. (2013). Dinamika Sistem Pendidikan Islam Di Dayah. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(2), 260-270.  
<https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.477>
- Mastuhu, M. (2005). Membangun Konsep Pendidikan dalam Era Multikultural. *Unisia*, 58(IV), 347-356.  
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art1>
- Miles Matthews, Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 Edition). Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington: Sage
- Mizaj, M. (2018). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(3), 13-21.  
<https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.27>
- Saiful. (2018). Model Pendidikan Karakter pada Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. *Mudarrisuna*, 8(1), 195-216.



<http://dx.doi.org/10.22373/jm.v8i1.2447>

Silahuddin, S. (2016). Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 349-369.

<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.296>

Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren* (Cet. 1). Jakarta: LP3ES.